

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan telah mendorong transformasi dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari implementasi prinsip good governance. Akuntabilitas keuangan daerah menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. (Mardiasmo, 2018)

Daerah (SIPD) atau Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem ini dirancang untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan agar lebih terstruktur dan terintegrasi. Implementasi sistem informasi tersebut terbukti berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah karena mampu meminimalkan kesalahan pencatatan serta mempercepat proses pelaporan keuangan. (Fernanda, Frinaldi, & Asnil, 2023).

Selain itu, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem ini memungkinkan penyajian informasi keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa

implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Arfianty & Virlayani, 2017).

Dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap sistem, serta kendala infrastruktur teknologi informasi. Hal ini dapat mempengaruhi optimalisasi penggunaan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi serta peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah agar tujuan akuntabilitas keuangan daerah dapat tercapai secara optimal

Seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang terintegrasi memungkinkan penyajian informasi keuangan secara cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif (Diwantari et al., 2024; Mardiasmo, 2018).

Di sisi lain, penerapan sistem informasi keuangan daerah juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin andal dan dapat dipercaya (Dewata et al., 2021; Mahmudi, 2016).

Namun, realitas dilapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan seperti keterlambatan pelaporan keuangan, ketidaksesuaian data, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem yang ada. Kondisi ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah (Anggara et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi terhadap implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah guna mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan (Zega & Silaban, 2023; Pasi et al., 2018)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, BAPPEDA dituntut untuk mampu mengimplementasikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, efektivitas sistem yang digunakan menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah (Anggara et al., 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman untuk mengetahui sejauh mana sistem yang diterapkan mampu mendukung akuntabilitas keuangan daerah serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Administrasi dan Pengelolaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Daerah.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Kota Pariaman dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Kota Pariaman?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan BAPPEDA Kota Pariaman dalam mengoptimalkan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Kota Pariaman dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem administrasi dan pengelolaan keuangan pada BAPPEDA Kota Pariaman
3. Mengetahui upaya yang dilakukan BAPPEDA Kota Pariaman dalam mengoptimalkan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah

1.4 Metode Penelitian

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada instansi terkait guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selain itu, penulis juga melakukan studi terhadap data yang relevan dengan objek penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Metode ini dilaksanakan melalui kegiatan magang yang dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman.

2. Wawancara

Pengumpulan data juga dilakukan melalui sesi tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3. Studi Pustaka

Pencarian data dilakukan melalui internet, dengan mencari bahan bahan pendukung lain melalui situs-situs terkait serta mengunjungi website yang dapat memberikan tambahan informasi bagi penulis dalam melengkapi data yang diperlukan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam program magang ini, penulis memilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 44, Desa Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat magang. Penulis menetapkan waktu pelaksanaan magang selama 40 (empat puluh) hari kerja

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas akhir ini dengan judul *“Implementasi Sitem Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Pada BAPPEDA Kota Pariaman Dalam Meningkatkan Keuangan Daerah”* Disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan pendahuluan yang mencakup latar belakang yang menjadi informasi umum tentang kondisi di lapangan dan pertanyaan-pertanyaan relevan penelitian, termasuk perumusan masalah, signifikansi penelitian atau tujuan penelitian, manfaat penelitian,serta gambaran umum sistematika penulisan proposal penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan inti pembahasan berdasarkan judul yang diangkat.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Mendetailkan gambaran umum mengenai tempat magang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pariaman

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahsan terkait hasil temuan yang didapatkan berdasarkan observasi

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi serta saran untuk pihak-pihak yang terkait.



